



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 91 TAHUN 2024  
TENTANG  
PANITIA PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEREMPUAN NASIONAL  
TAHUN 2024

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong perempuan potensial di akar rumput untuk merepresentasikan perspektifnya dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dengan menggunakan perspektif Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI), diselenggarakan Musyawarah Perempuan Nasional;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Musyawarah Perempuan Nasional Tahun 2024, perlu dibentuk panitia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panitia Musyawarah Perempuan Nasional Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan

Penganggaran ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
  4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PANITIA PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEREMPUAN NASIONAL TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Panitia Musyawarah Perempuan Nasional Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan untuk penyelenggaraan Musyawarah Perempuan Nasional Tahun 2024.

KETIGA : Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

a. Pengarah ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Koordinator Bidang Substansi;
- d. Koordinator Bidang Acara, Pameran, dan Bazar;
- e. Koordinator Bidang Data;
- f. Koordinator Bidang Publikasi; dan
- g. Koordinator Bidang Advokasi.

**KEEMPAT** : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a mempunyai tugas menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyukseskan pelaksanaan penyelenggaraan Musyawarah Perempuan Nasional Tahun 2024.

**KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas menjamin seluruh proses kegiatan sesuai dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

**KEENAM** : Koordinator Bidang Substansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf c mempunyai tugas memastikan ketersediaan hasil musyawarah tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan nasional dibahas dalam Musyawarah Perempuan Nasional Tahun 2024.

**KETUJUH** : Koordinator Bidang Acara, Pameran, dan Bazar sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf d mempunyai tugas menyusun desain acara pelaksanaan penyelenggaraan Musyawarah Perempuan Nasional Tahun 2024.

**KEDELAPAN** : Koordinator Bidang Data sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf e mempunyai tugas memastikan ketersediaan data kualitatif dan kuantitatif dari tingkat desa, kabupaten, dan nasional pada penyelenggaraan Musyawarah Perempuan Nasional Tahun 2024.

**KESEMBILAN** : Koordinator Bidang Publikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf f mempunyai tugas memastikan ketersediaan video, publikasi tulisan, dan media untuk memperkuat advokasi hasil Musyawarah Perempuan Nasional Tahun 2024.

KESEPULUH ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

**KESEPULUH :** Koordinator Bidang Advokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf g mempunyai tugas memastikan rekomendasi hasil Musyawarah Perempuan Nasional Tahun 2024 tersampaikan kepada kementerian/lembaga terkait.

**KESEBELAS :** Pendanaan yang diperlukan sebagai ditetapkannya Keputusan Sekretaris Kementerian ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024 dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEDUA BELAS:** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2024

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU 



 Salinan sesuai dengan aslinya

.....  
Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Biro Hukum dan Humas

.....  
Margareth Robin K



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 91 TAHUN 2024  
TENTANG  
PANITIA PENYELENGGARAAN  
MUSYAWARAH PEREMPUAN NASIONAL  
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN	INSTANSI
<b>I</b>	<b>Pengarah</b>	Plt. Sekretaris Kementerian	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>II</b>	<b>Penanggung Jawab</b>		
	Ketua	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Anggota	1. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		4. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		5. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		6. Staf Khusus Menteri	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		7. Staf Khusus Menteri	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN	INSTANSI
		8. Staf Khusus Menteri	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		9. Misiyah	Institut KAPAL Perempuan
		10. Wahyu Susilo	<i>Migrant Care</i>
		11. Tri Hastuti Nur Rochimah	'Aisyiyah
		12. Dina Lumbantobing	Perempuan Sumatera Mampu
		13. Nani Zulminarni	Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga
		14. Yusran Laitupa	Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia
		15. Yasir Sani	Kemitraan
		16. Joni Yulianto	Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel
		17. Ranie Ayu Hapsari	Pusat Rehabilitasi Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum
		18. Ufi Ulfiah	Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama
<b>III</b>	<b>Koordinator Bidang Substansi</b>		
	Ketua	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial Budaya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Anggota	1. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Endah Trita Agustiana	Sekretariat INKLUSI (Kemitraan Australia - Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif)
		3. Bambang Teguh Karyanto	<i>Migrant Care</i>
		4. Anastasia Savitri	<i>Migrant Care</i>
		5. Budhis Utami	Institut KAPAL Perempuan
		6. Lusia Palulungan	Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia
		7. Romlawati	Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN	INSTANSI
		8. Ranie Ayu Hapsari	Pusat Rehabilitasi Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum
		9. Vidia	Pusat Rehabilitasi Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum
		10. Rohamnu Soliki	Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel
		11. Ninik Heca	Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel
		12. Muh. Syamsudin	Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel
		13. Widya Anggraini	Kemitraan
		14. Nurun Nisa	Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama
		15. Musliha	Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama
		16. Muvitasari	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
		17. Dwi Yunanto Hermawan	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
		18. Tursiah	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
		19. Hajar Nur Setyowati	'Aisyiyah
		20. Heni Hikmawati	'Aisyiyah
		21. Ramadhaniati	Perempuan Sumatera Mampu
<b>IV</b>	<b>Koordinator Bidang Acara, Pameran, dan Bazar</b>		
	Ketua	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Wakil Ketua	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Anggota	1. Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN	INSTANSI
		3. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		4. Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		5. Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		6. Yusnaningsi Kasim	Institut KAPAL Perempuan
		7. Indri Sri Sembadra	Institut KAPAL Perempuan
		8. Khusnul Khotimah	Institut KAPAL Perempuan
		9. Alfiah Aulia Magfirah	Institut KAPAL Perempuan
		10. Tracy Pasaribu	Kemitraan
		11. Melya Findi Astuti	Kemitraan
		12. Trisna Dwi yuni Aresta	<i>Migrant Care</i>
		13. Fadilla Nisa Febrianti	<i>Migrant Care</i>
		14. Kuni Fatonah	Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel
		15. Ramida Sinaga	Perempuan Sumatera Mampu
		16. Ulfatun Hasanah	Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama
		17. Nuraini Abu Bakar	Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama
		18. Nunik Sri Harini	Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga
		19. Muvitasari	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
		20. Liska Fauziah	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
		21. Alvonsius Gita Mahendra Lumunon	Pusat Rehabilitasi Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum
		22. Gregorius Gyan Puruhito	Pusat Rehabilitasi Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum
		23. Vita Murni	Pusat Rehabilitasi Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN	INSTANSI
		24. Rivai	Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia
<b>V</b>	<b>Koordinator Bidang Data</b>		
	Ketua	Kepala Biro Data dan Informasi	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Wakil Ketua	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Anggota	1. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga Rentan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3. Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		4. Paskal Kleden	Sekretariat INKLUSI (Kemitraan Australia - Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif)
		5. Amores Hamonangan	Sekretariat INKLUSI (Kemitraan Australia - Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif)
		6. Titik Hartini	Institut KAPAL Perempuan
		7. Mh. Firdaus	Institut KAPAL Perempuan
		8. Justin Anthonie	Institut KAPAL Perempuan
		9. Ana Margaret	Cakra Wikara Indonesia
		10. Charina Chazali	Pusat Analisis Sosial Universitas Katolik Parahyangan (AKATIGA-UNPAR)
		11. Ana Yunita Pratiwi	Perempuan Sumatera Mampu
		12. Martha Raggi Primanthi	Badan Kerjasama dan Manajemen Universitas Airlangga
		13. Windy Triana	Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN	INSTANSI
		14. Tri Muhartini	Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Universitas Gadjah Mada
		15. Wenny Wandasari	Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (Puskapa UI)
		16. Erina Slamet Saputri	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
		17. Heny Widyaningrum	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
		18. Raihan Anwar	<i>Migrant Care</i>
		19. Tracy Pasaribu	Kemitraan
		20. M. Ghufran Kordi K	Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia
		21. Zuriah Auliah	Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia
<b>VI</b>	<b>Koordinator Bidang Publikasi</b>		
	Ketua	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Wakil Ketua	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial Budaya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Anggota	1. Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3. Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		4. Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		5. Afa Hanifa	Institut KAPAL Perempuan
		6. Yusnaningsi Kasim	Institut KAPAL Perempuan
		7. Melya Findi Astuti	Kemitraan
		8. Melyn Sopjan	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
		9. Sely Fitriani	Perempuan Sumatera Mampu



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN	INSTANSI
		10. Frans Gosali	Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia
		11. Gian Puruhito	Pusat Rehabilitasi Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum
		12. Dhina M. Kartikasari	Sekretariat INKLUSI (Kemitraan Australia - Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif)
<b>VII</b>	<b>Koordinator Bidang Advokasi</b>		
	Ketua	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Wakil Ketua	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Anggota	1. Inspektur	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Misiyah	Institut KAPAL Perempuan
		3. Wahyu Susilo	<i>Migrant Care</i>
		4. Endah Trista Agustiana	Sekretariat INKLUSI (Kemitraan Australia - Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif)
		5. Yudi Supriadi	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
		6. Budhis Utami	Institut KAPAL Perempuan
		7. Samsidar	Perempuan Sumatera Mampu

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU